

**FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
(KPLP) DALAM PELAKSANAAN PATROLI MARITIM GUNA
PENEGAKAN UNDANG – UNDANG PELAYARAN DALAM
WILAYAH HUKUM KSOP TANJUNG EMAS SEMARANG**



SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Terapan Pelayaran**

Disusun Oleh :

MUKHAMMAD MIFTAKHUN NI'AM
52155864 K

PROGAM STUDI

KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN

DIPLOMA IV POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG


2019

HALAMAN PERSETUJUAN


**FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (KPLP) DALAM
PELAKSANAAN PATROLI MARITIM GUNA PENEGAKAN UNDANG –
UNDANG PELAYARAN DALAM WILAYAH HUKUM KSOP TANJUNG
EMAS SEMARANG**

DISUSUN OLEH :
MUKHAMMAD MIFTAKHUN N'AM
NIT. 52155864 K

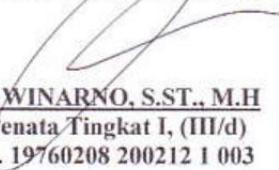
Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan didepan
Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,2019

Dosen Pembimbing
Materi

Dr. WINARNO, S.ST., M.H
Penata Tingkat I, (III/d)
NIP. 19760208 200212 1 003



Dosen Pembimbing
Metodologi dan Penulisan

H. MUSTHOLIQ, M.M, M.Mar.E
Pembina IV/a
NIP. 19650320 199303 1 002

Mengetahui
Ketua Progam Studi KALK


Dr. WINARNO, S.ST., M.H
Penata Tingkat I, (III/d)
NIP. 19760208 200212 1 003

HALAMAN PENGESAHAN
FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (KPLP)
DALAM PELAKSANAAN PATROLI MARITIM GUNA PENEGAKAN
UNDANG – UNDANG PELAYARAN DALAM WILAYAH HUKUM
KSOP TANJUNG EMAS SEMARANG

DISUSUN OLEH :

MUKHAMMAD MIFTAKHUN NI'AM

NIT. 52155864 K

Telah Diujikan dan Disahkan oleh Dewan Penguji
Serta Dinyatakan Lulus Dengan Nilai

Pada Tanggal

Penguji I  <u>HENNY WAHYU., M.Pd</u> Pembina (IV/a) NIP. 19541108 198003 2 002	Penguji II  <u>Dr. WINARNO, S.ST., M.H</u> Penata Tingkat I, (III/d) NIP. 19760208 200212 1 003	Penguji III  <u>VEGA FONSU LA ANDROMEDA, S.ST., S.Pd</u> Penata Tingkat. I (III/d) NIP. 19770326 200212 1 002
		
Dikukuhkan Oleh :		
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang		

Dr.Capt. MASHUDI ROFIK., M.Sc

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670605 199808 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUKHAMMAD MIFTAKHUN NI'AM

NIT : 52155864 K

Progam Studi : KALK

Menyatakan bahwa skripsi ini yang saya buat dengan judul “ **FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (KPLP) DALAM PELAKSANAAN PATROLI MARITIM GUNA PENEGAKAN UNDANG – UNDANG PELAYARAN DALAM WILAYAH HUKUM KSOP TANJUNG EMAS SEMARANG** “ adalah benar hasil karya Saya bukan jiplakan skripsi dari orang lain dan Saya bertanggung jawab terhadap judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka Saya bersedia membuat skripsi dengan judul baru atau menerima sanksi lain.

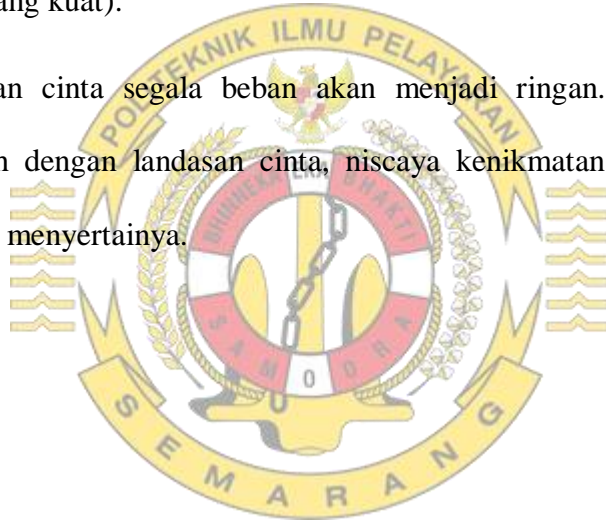
Semarang2019

Yang Menyatakan


METERAI TEMPEL
47E40AFFB18296490
5000
RUPIAH
MUKHAMMAD MIFTAKHUN NIAM
52155864 K

MOTTO

- ❖ Jika ada yg mencaci atau memfitnah kita jangan dibalas, doakan ia, karena cacian dan fitnahnya menghapus dosa kita dan membuat kita lebih dicintai Allah swt, jika kita membalasnya maka kita sama pula keburukannya dg orang itu.
- ❖ Tidak akan naik pada derajat yang tinggi kecuali dengan himmah (cita-cita yang kuat).
- ❖ Dengan cinta segala beban akan menjadi ringan. Kerjakan semua ibadah dengan landasan cinta, niscaya kenikmatan dan kebahagiaan selalu menyertainya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Puji syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas banyak nikmat hidup dan kesempatan mengemban ilmu hingga saat ini. Dan banyak syukur atas orang-orang yang Engkau kirimkan kepadaku yang telah menjagaku, menyayangiku dan mengingatkan disaat lalaiku.
2. Bapak (H. Mulyadi) dan Ibuku (Hj. Ismawati) orang tuaku yang tercinta yang selalu mendukung dan memberikan segalanya yang terbaik dan atas semua dukungan do'a untuk keberhasilan impian saya. Adik saya (Roro Putri Narulita & M. Agil Reza S) tersayang yang pasti selalu mendoakan yang terbaik dan memberi semangat untuk kakak nya ini.
3. Rasa terima kasih kepada para Bapak & Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya bisa lulus hingga saat ini.
4. Terimakasih kepada seluruh pegawai Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian akhir ini.
5. Untuk Senior dan rekan-rekan angkatan LII yang selalu kompak dan selalu optimis terutama kelas KALK yang paling heboh dan tak terlupakan beserta jajaran Staff periode 88 dan 89 yang tidak akan pernah terlupakan.
6. Terimakasih kepada seluruh anggota kompi *Gienah* yang membantu dalam pembuatan skripsi ini.
7. Kepada Nanda Ayu Febrian, Sinatrya Alief dan Mela Nur yang selalu menemani saya dan tidak pernah berhenti mendukung saya dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Dalam Pelaksanaan Patroli Maritim Guna Penegakan Undang – Undang Pelayaran Dalam Wilayah Hukum KSOP Tanjung Emas Semarang”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel). Dengan adanya motivasi dan bimbingan dari pihak – pihak yang bersangkutan, maka pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Capt. Mashudi Rofik., M. Sc selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang tahun 2019.
2. Dr. Winarno, S.ST, M.H, selaku Ketua Progam Studi KALK PIP Semarang sekaligus dosen pembimbing materi skripsi yang dengan sabar memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. H. Mustholiq, M.M, M.Mar.E, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yth. Para Dosen di PIP Semarang dan khususnya para dosen bidang KALK yang dengan sabar memberi pengarahan dan bimbingan selama penulis menimba ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

5. Yang tercinta kedua orangtua peneliti Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Ismawati yang tak henti hentinya memberikan dorongan baik moril maupun nonmaterial serta kasih sayangnya.
6. Kepada Staff & Demustar periode 88 dan 89 yang selalu kompak dalam suka maupun duka.
7. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca karya tulis ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pikir Penelitian	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
B. Sumber Data	18

C. Metode Pengumpulan Data	19
D. Metode Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	24
B. Analisa Hasil Penelitian	35
C. Pembahasan Masalah	47
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 Kerangka Pikir
- Gambar IV.1 Logo Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)
- Gambar IV.2 Peta DLKr wilayah laut
- Gambar IV.3 Peta DLKr wilayah daratan



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Struktur Organisasi KSOP Tanjung Emas Semarang
Tabel IV.2	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan Kelautan
Tabel IV.3	Jumlah Kecelakaan Kapal di Tanjung Emas Semarang
Tabel IV.4	Data Kapal Patroli KPLP
Tabel IV.5	Crew beserta Jabatan KNP 337
Tabel IV.6	Daftar Senjata Api KPLP
Tabel IV.7	Peran Crew Kapal Patroli dalam Operasi SAR Penanggulangan Pencemaran
Tabel IV.8	Peran Crew Kapal Patroli dalam Operasi SAR Kapal Kandas
Tabel IV.9	Peran Crew Kapal Patroli dalam Operasi SAR Kapal Tubrukan
Tabel IV.10	Peran Crew Kapal Patroli dalam Operasi SAR Kapal Tenggelam
Tabel IV.11	Peran Crew Kapal Patroli dalam Operasi SAR Kapal Terbakar
Tabel IV.12	Perbandingan Kapal Patroli KPLP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Transkrip Wawancara
Lampiran II	Gambar Pelaksanaan Patroli Maritim
Lampiran III	Prosedur PPNS Menangani Tindak Pidana Pelayaran
Lampiran IV	Kapal Patroli KPLP
Lampiran V	Senjata Api KPLP



ABSTRAK

Mukhammad Miftakhun Ni'am, 2019, 52155864 K, "*Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Dalam Pelaksanaan Patroli Maritim Guna Penegakan Undang – Undang Pelayaran Dalam Wilayah Hukum KSOP Tanjung Emas Semarang* ", Skripsi Progam Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Progam Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Dr. Winarno, S.ST, M.H., Pembimbing II: H.Mustholiq, M.M, M.Mar.E.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) merupakan Direktorat yang berfungsi sebagai penjaga dan penegak aturan sesuai dengan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. KPLP ini diperlukan karena arus kapal yang masuk ke pelabuhan Tanjung Emas mengalami peningkatan dan perlunya patroli maritim guna menghindari musibah dilaut. Tujuan penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui bagaimana gambaran kegiatan patroli maritim diwilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang 2). Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan patroli maritim diwilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang 3). Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan objek yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan, 1). Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan patroli sesuai dengan DLKr dan DLKp di pelabuhan Tanjung Emas Semarang, tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaannya pada sarana dan peralatan pendukung patroli. 2). Kendala yang dihadapi saat patroli yaitu keadaan peralatan pendukung patroli seperti :kapal patroli, senjata api, *handytalky*, memerlukan pememajaan dan juga peningkatan ketrampilan para personil KPLP. 3). Perawatan peralatan pendukung patroli dengan baik dan juga peningkatan diklat ketrampilan agar para personil memiliki kemampuan dan keahlian dalam bertugas.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan peneliti memberikan saran 1). Sebaiknya KPLP dalam pelaksanaan patroli lebih tegas dalam penegakan hukum di pelabuhan agar kegiatan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang tetap berjalan dengan aman dan tertib 2). Sebaiknya peralatan yang digunakan dalam patroli lebih canggih lagi agar dalam pelaksanaan patroli maritim tidak ada kendala sehingga fungsi dari KPLP dapat berjalan dengan baik 3). Sebaiknya Pemerintah Indonesia turut andil dalam pemberian sarana dan peralatan pendukung patroli agar keadaan perairan di Tanjung Emas lebih aman lalu diadakanya latihan gabungan bersama dengan pihak TNI AL - Polri dan tertib dan juga Pemerintah memudahkan para personil KPLP untuk meningkatkan ketrampilan mereka melalui diklat yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata kunci : Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kapal patroli, Tanjung Emas Semarang

ABSTRACT

Mukhammad Miftakhun Ni'am 2019 . 52155864K "*The Function Of Coast Guard In Implementation Of Maritime Patrol To Enforce The Marine Constitution In Reliability And Port Authority Law Zone Of Tanjung Emas Semarang*". "The Mini Thesis Of Port And Shipping Department . Diploma IV Program . Semarang Merchant Marine Polytechnic The 1ST Advisor : Dr. Winarno, S.ST, M.H And The 2nd Advisor : H.Mustholiq, M.M, M.Mar.E

The Coast Guard is directorate which functionate for being the guard and enforcer the rules based on UU No 17 2008 about marine The Coast Guard is needed because the vessel flow which get in Tanjung Emas Port have enhancement and need maritime patrol to avoid the maritime distarter. The purpose of this research are : 1). To knowing the description of maritime patrol activity in reliability and port authority law zone Tanjung Emas Semarang. 2). To knowing about the problems which faced when doing maritime patrol in reliability and port authority law zone Tanjung Emas Semarang. 3). To knowing the efforts for resolves the problem which happened in this topic the research using the descriptive qualitative writing method to descriptive and explain about object which observed,more over this research using observation , interview and literature study.

The research result which researcher did, 1). The unity of coast guard doing patrol appropriate with Regional work environment and environmental areas of interest in Tanjung Emas Harbour Semarang. But, theres some problems when implementation in equipment facilities which support patrol. 2). The problems which faced when patrol is the condition of patrol support equipment live : patrol boat,guns,handytooling, need renewal and inchantment skills. For the member of Coast Guard.3). the patrol support equipment treatment should I be better and enhance the training skills. So that the member has power and skill ful on duty.

Based on the research. Researcher give some advice . 1). The coast guard should more firm in enforce the law on harbour to make sure the activity in Tanjung Emas Semarang harbour still running safe and orderly. 2). It will be better if the equipment which used when patrol more SOP his ricared so that in implementation of maritime patrol nothing problems found and the function of coast guard can running well . 3). Is better if the Indonesian . government support the patrol to make the condition of sea area in Tanjung Emas more safe and if will be better . if theres join training with TNI AL-POLRI and the government make easy for all coast guard member to improve then skills from the training which held by government.

Keyword: Coast guard, Patrol boat,Tanjung Emas Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Pelayaran dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional. sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolak ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Pelabuhan dalam menjalankan fungsi dan aktivitas harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kewanamanan untuk melindungi kapal, muatan, fasilitas jasa dan instalasi vital yang berlokasi, dilayani, serta dioperasikan di pelabuhan

. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) atau *Indonesia Sea and Coast Guard* merupakan Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia tentunya tidak lepas dari peran KPLP dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga dan penegak peraturan perundangan di laut dan pantai. Ketentuan pada pasal 276 Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan pembentukan KPLP yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. KPLP harus dibentuk berdasarkan pasal 276 Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam melaksanakan tugas, KPLP didukung oleh sarana prasarana berupa kapal negara sebagaimana yang diatur oleh pasal 279 ayat 1 UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. KPLP mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan tata kelola keamanan maritim, langkah yang perlu diambil berkaitan langsung dengan penyediaan kerangka hukum yang memadai secara spesifik dan pengelolaan ulang aspek

kelembagaan yang tumpang tindih di dalam tata kelola keamanan maritim. Sehubungan dengan ramainya aktivitas pelabuhan di Tanjung Emas Semarang, maka dibutuhkan pengawasan dari pihak KPLP sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan dibutuhkan patroli maritim guna menjaga keamanan kegiatan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang agar kegiatan di laut tetap berjalan dengan baik.

Penelitian Nuryanto:2006 yang berjudul *“Peranan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Dalam Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”*. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan secara umum tentang kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan patroli dilapangan serta kualitas kapal patroli yang membutuhkan perbaikan.

Penelitian Herdian Mulyo Prasetyo:2007 yang berjudul *“Peranan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dalam Hubungannya Dengan Search And Rescue Di Wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”* Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang keterlibatan KPLP dalam penanganan musibah yang terjadi dilaut serta pelatihan – pelatihan yang dilakukan untuk menambah kemampuan para personil KPLP.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti memilih judul tentang *“Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam Pelaksanaan Patroli Maritim Guna Penegakan Undang - Undang Pelayaran dalam Wilayah Hukum KSOP Tanjung Emas Semarang.”*

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ilmiah perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting, sebab perumusan masalah akan memudahkan dalam melakukan penelitian dan mencari jawaban yang lebih akurat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kegiatan patroli maritim KPLP di wilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang ?
2. Kendala apa yang dihadapi saat melakukan patroli maritim di wilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengalaman peneliti dan pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian, maka tujuan dari peneliti skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kegiatan patroli maritim di wilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan patroli maritim di wilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendali yang terjadi

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan sumbangan yang berarti bagi pihak – pihak terkait dengan dunia pelayaran dan dunia keilmuan, seperti :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan informasi teoritis bagi taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang khususnya program studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan maupun KSOP Tanjung Emas Semarang mengenai fungsi KPLP dalam melaksanakan patroli maritim di wilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang.

2. Manfaat secara praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran praktis bagi pengembangan kajian ilmu Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) terutama yang terkait dengan fungsi KPLP dalam melaksanakan patroli maritim di wilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian skripsi ini akan diajukan 5 (lima) bab, yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum, namun berhubungan dengan penelitian yang disajikan (sebagai pengantar) dan kemudian pada bab-bab selanjutnya peneliti membahas tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul dan disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan akan sangat

memudahkan para pembaca memahami, bahkan lebih mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh peneliti dalam skripsi ini. Berikut ini adalah uraian ringkas mengenai sistematika penelitian skripsi ini dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai uraian yang melatar belakangi pemilihan judul, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan teori – teori atau pemikiran – pemikiran yang melandasi judul penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan utuh yang dijadikan landasan penyusunan kerangka pemikiran, dan definisi operasional tentang variabel atau istilah lain dalam penelitian yang dianggap penting.

BAB III. Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil penelitian dan pemecahan masalah guna memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

BAB V. Penutup

Penutup menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Fungsi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia ditemukan bahwa pengertian fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Sedangkan Menurut Moekijat (2008:22) Fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

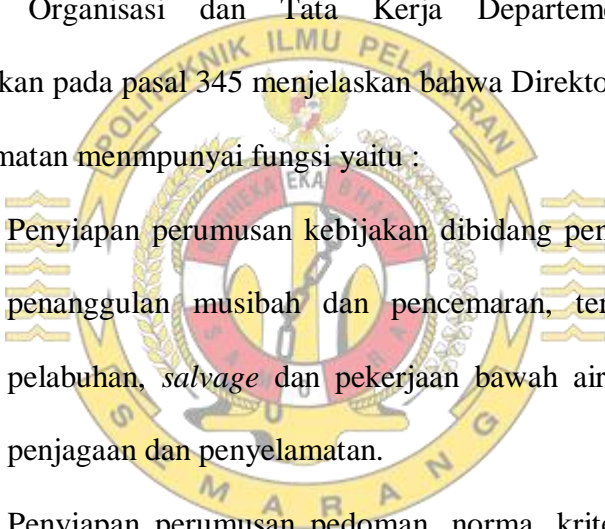
Menurut Sutarto (2008:22) Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

2. Pengertian Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Republik Indonesia atau *Indonesia Sea and Coast Guard* merupakan instansi keamanan pelabuhan dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 276 KPLP dibentuk untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dan menegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

KPLP mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan menetapkan pada pasal 345 menjelaskan bahwa Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai fungsi yaitu :

- 
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengamanan, patroli, penanggulan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.
 - b. Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur dibidang pengamanan, patroli, penanggulan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.
 - c. Pemberian bimbingan teknis dibidang pengamanan patroli, penanggulan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan

pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.

- d. Penyiapan pemberian perizinan pelayanan dibidang tertib perairan dan pelabuhan, penanggulangan musibah dan pencemaran serta *salvage* dan pekerjaan bawah air serta penyelamatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang perairan dan pelabuhan, penanggulangan musibah dan pencemaran serta *salvage* dan pekerjaan bawah air serta penyelamatan.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Dalam pelaksanaan KPLP dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri, Dalam hal ini Menteri yang dimaksud adalah Menteri Perhubungan.

Menurut Keputusan Menteri Nomor 65 Tahun 2002 Pasal 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP diberikan sarana penunjang operasional untuk melaksanakan patroli keamanan laut berupa kapal patroli, dermaga, ruang komando dan komunikasi penjagaan laut dan pantai dan juga sarana penunjang lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya pihak KPLP mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 283 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang diantaranya yaitu :

- a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran
- b. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran
- c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran

- f. Memotret atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri dan kartu tersebut merupakan keabsahan wewenang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

3. Pengertian Patroli Laut

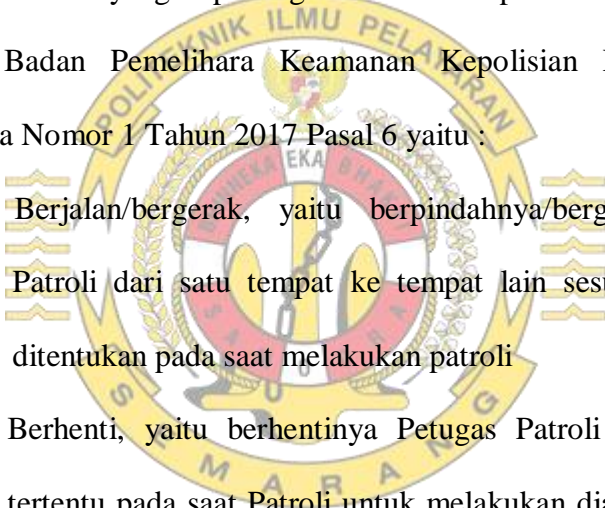
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Patroli adalah 1. perondaan (oleh polisi, tentara, dan sebagainya) 2. polisi (tentara dan sebagainya) yang sedang meronda.

Berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan Nomor SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli

, pengertian Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ancaman gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Adapun metode yang dapat digunakan dalam patroli menurut Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 6 yaitu :

- 
- a. Berjalan/bergerak, yaitu berpindahya/bergeraknya Petugas Patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan pada saat melakukan patroli
 - b. Berhenti, yaitu berhentinya Petugas Patroli di suatu tempat tertentu pada saat Patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas
 - c. Berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antar Petugas Patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan Kamtibmas dalam melaksanakan Patroli

- d. Observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/ melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran Patroli
- e. Penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara Petugas Patroli setelah melakukan observasi
- f. Pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian Petugas Patroli yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pengertian Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk - bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau - pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial,

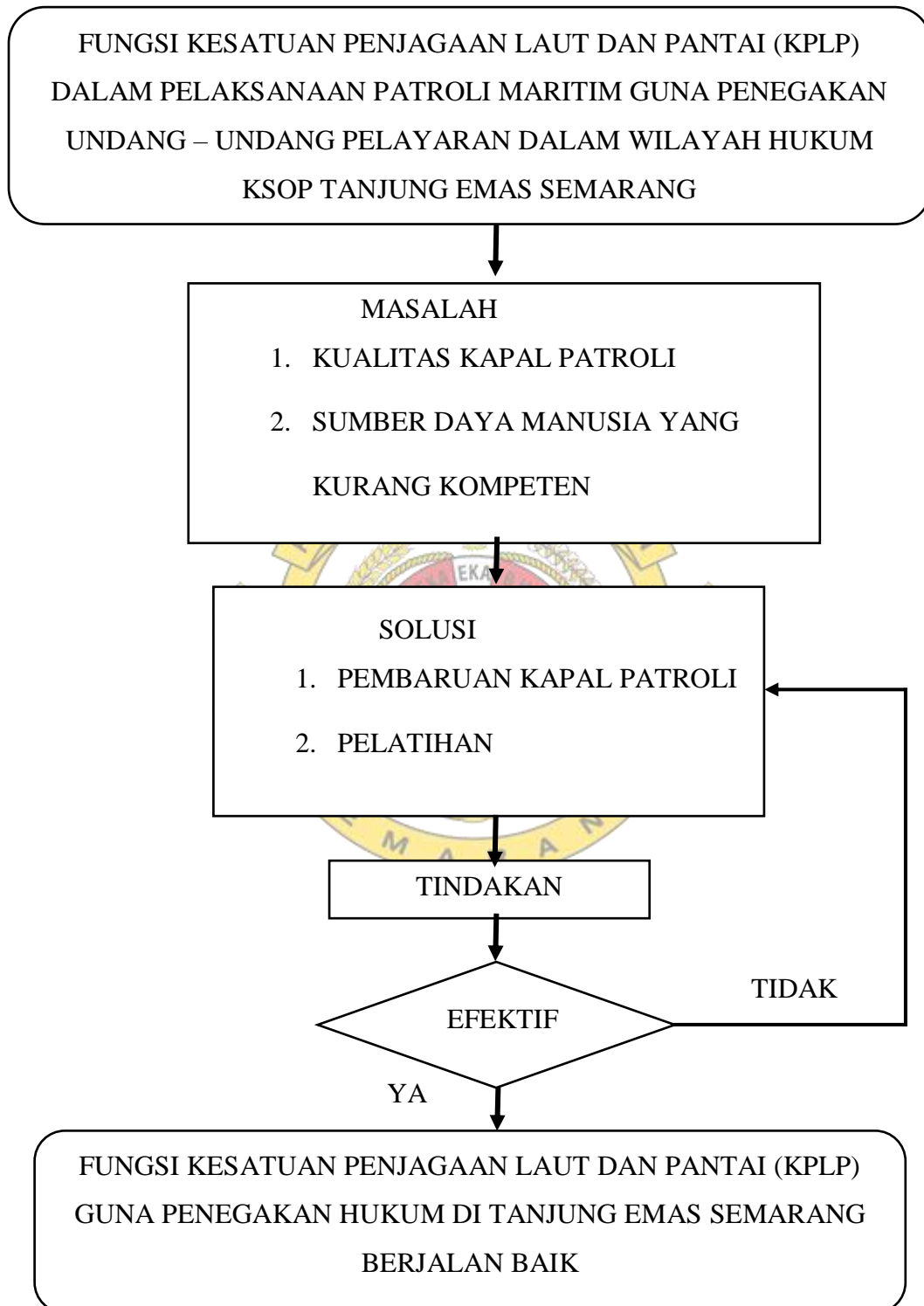
termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedaulatan Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

4. Pengertian Maritim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Maritim adalah berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

Menurut Geoffrey Till dalam bukunya yang berjudul “*Seapower*”, menyatakan bahwa Maritim ada kalanya dimaksudkan hanya berhubungan dengan angkatan laut, kadang juga diartikan tugas sebagai angkatan laut dalam hubungannya dengan kekuatan darat dan udara, kadang juga diartikan sebagai angkatan laut dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam kaitannya dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan komersil.

G. Kerangka Berpikir



Gambar II.1 Kerangka Pikir

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian – uraian sebelumnya tentang pembahasan mengenai fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam pelaksanaan patroli maritim guna penegakan Undang – Undang pelayaran dalam wilayah hukum KSOP Tanjung Emas Semarang, maka sebagai bagian akhir dari skripsi ini peneliti mencoba memberikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Patroli yang dilaksanakan oleh KPLP berdasarkan peta Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) di pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya pada sarana dan peralatan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari KPLP.
2. Kendala yang dihadapi KPLP yaitu keadaan sarana dan peralatan pendukung patroli memerlukan peremajaan seperti, kapal patroli yang sudah terlalu lama sehingga mobillisasi untuk melaksanakan kegiatan patroli terhambat, pembaruan senjata api untuk berdinamika dan juga perlunya diklat ketrampilan khusus untuk para personil KPLP.

3. Upaya – upaya yang perlu dilakukan oleh KPLP antara lain selalu menjaga sarana dan peralatan yang digunakan, seperti perawatan kapal patroli secara berkala, perawatan senjata dinas dengan baik dan juga mengikuti diklat ketrampilan yang telah disediakan oleh Pemerintah agar fungsi dari KPLP akan semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebagai berikut :

1. Sebaiknya KPLP dalam pelaksanaan patroli harus lebih tegas lagi dalam penegakan hukum di pelabuhan agar kegiatan di pelabuhan Tanjung Emas tetap berjalan dengan aman dan tertib, karena ancaman dan gangguan keamanan bisa datang kapan saja dengan meningkatkan profesionalisme dan rasa tanggung jawab kepada seluruh personil KPLP.
2. Perlunya sistem peralatan yang semakin canggih serta perlengkapan operasional dalam pelaksanaan patroli seperti pembaruan kapal patroli agar mampu melaksanakan patroli dengan jarak yang jauh, pembaruan senjata api, dan peningkatan alat penunjang lainnya. Selain itu diperlukan juga ketrampilan yang mumpuni dari para personil KPLP.
3. Sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia memberikan sarana dan prasarana yang lebih baik kepada pihak keamanan di laut dalam hal ini adalah KPLP dan juga Pemerintah memberikan kemudahan untuk para

personil untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan ketepatan agar dapat mengatasi segala ancaman dan gangguan di pelabuhan dan bisa berlatih bersama dengan instansi lainya seperti TNI AL dan Kepolisian untuk semakin memperkuat keamanan di pelabuhan



DAFTAR PUSTAKA

- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers.
- Lasse, D.A., 2009, *Manajemen Muatan*, Nika: Jakarta.
- Tim Penyusun, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pandom Media Nusantara: Jakarta Barat
- Budiyanto, Eko Hariyadi dan Raja Oloan Saut Gurning. 2017, *Manajemen Pelabuhan*, PT. Andhika Prasetya Ekawahana: Surabaya
- Handoyo, Jusak Johan., Widigdho., dan Desamen Simatupang. 2018, *Manajemen Budaya Keselamatan, Keamanan, & Pelayaran Maritim*, Djangkar: Jakarta
- Nuryanto. 2006. *Peranan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Dalam Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. Skripsi. PIP Semarang
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Munaf, Susanto Dicky R, 2015, *Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan laut : Berbasis sistem Peringatan Dini*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Moleong, J Lexy, 2014, *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- _____.Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Jurnal patroli news, 26 November 2018, *Mengenal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)*, (<https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/mengenal-kesatuan-penjaga-laut-dan-pantai-kplp>), diakses pada tanggal 23 Juni 2018

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Capt. Freddy Visba Silaban, S.Sos, MM, M. Mar (B)

Jabatan : Nahkoda KNP 337

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (A) dengan Narasumber (B),

A : Mohon ijin Capt, mohon ijin bagaimana proses Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan tugas ?

B : Kita bekerja berdasarkan SOP yang berlaku di kapal, mulai dari daerah patroli kita harus sesuai DLKr dan DLKp yang telah ditentukan lalu proses kapal yang akan masuk ke pelabuhan kita harus mengecek semua perlengkapan dokumen maupun awak kapal.

A : Lalu Apakah perlengkapan yang harus dibawa selama patroli ?

B : Yang perlu kita siapkan selama pelaksanaan patroli antara lain, kapal patroli kami memiliki kapal yang paling besar yakni KNP 337 tapi banyak kekurangannya karena kapal ini sudah terlalu lama sehingga tidak maksimal selama patroli, lalu *Handy Talky* atau HT untuk komunikasi dikapal, lalu radio komunikasi untuk kita berkomunikasi dengan kapal lain, ada senjata api yang perlu juga diperbarui, senter kalua kita patroli di malam hari dan masih banyak lagi.

A : Apakah ada kendala selama pelaksanaan patroli Capt ?

B : Perlunya pembaruan armada karna kapal ini tidak bisa menjangkau daerah yang luas tapi kita harus bisa patroli sampai daerah yang ditentukan. Lalu para personil kita ini perlu adanya peningkatan keterampilan yang bisa membuat para personil lebih sigap dan terampil dalam pelaksanaan tugas sebagai KPLP.

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Dimas Pangarso, SH (B)

Jabatan : Kerani KNP 337

Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti (A) dengan Narasumber (B),

A : Mohon izin Bapak, apakah selama melaksanakan patroli maritim anda memahami fungsi dari Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ?

B : Benar tar, kita bekerja sudah ada payung hukumnya di UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di bab XVII sudah dijelaskan tugas dan fungsi KPLP itu seperti apa jadi kita melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

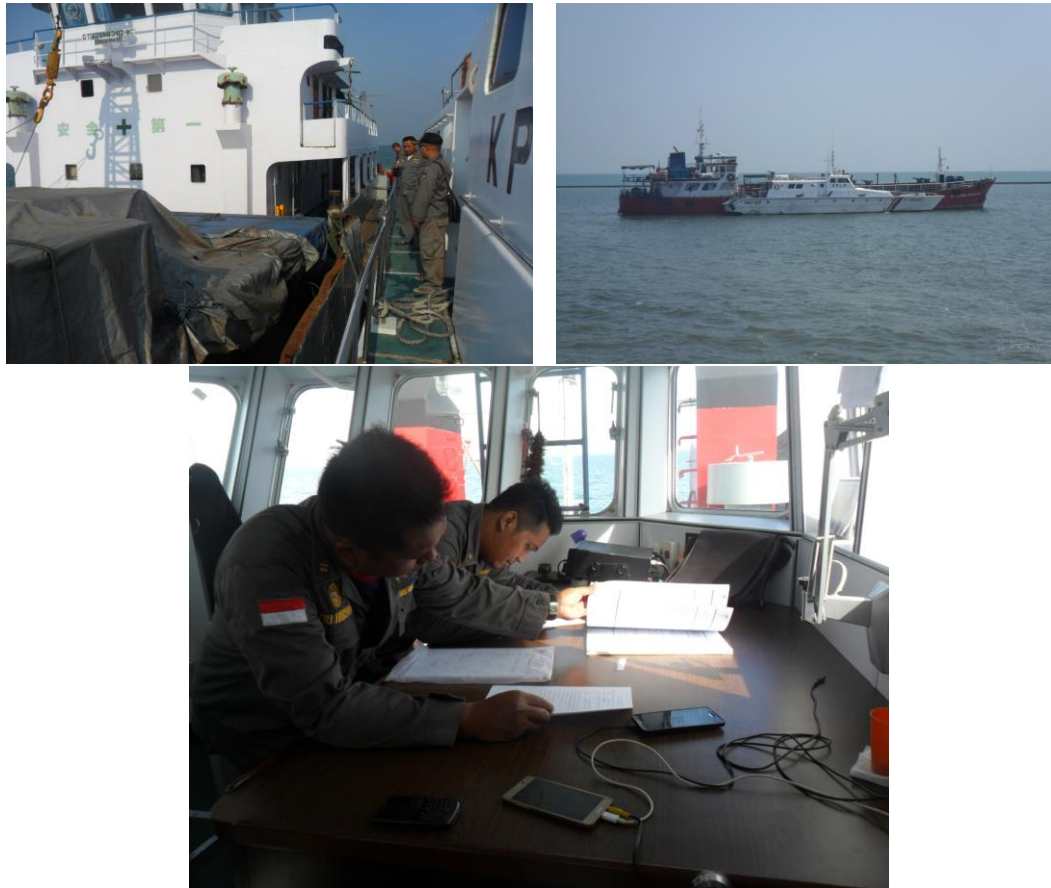
A : Selanjutnya, Apakah Bapak pernah mengikuti diklat atau keterampilan yang lain ?

B : Saya lulusan hukum jadi dulu saya belum menguasai tentang pelayaran lalu saya masuk di KPLP dan mengikuti diklat ORU, saya rasa banyak personil yang harus mengikuti diklat agar kita lebih menguasai bagaimana pengetahuan tentang KPLP

A : Apakah kesulitan yang anda alami selama patroli maritime pak ?

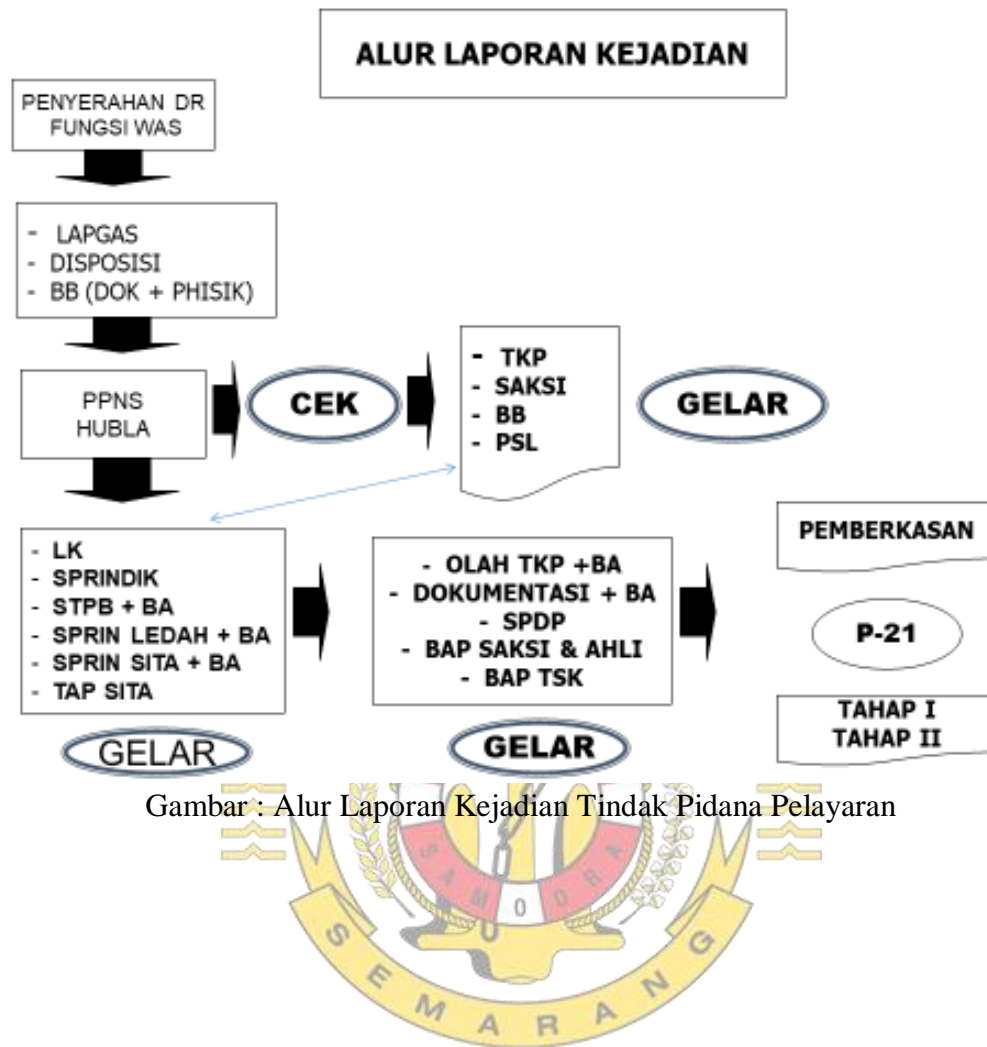
B : Menurut saya kita bisa mendapatkan hasil maksimal jika perlengkapan patroli kita lebih baik lagi, seperti pembaruan kapal patroli, senjata api, dan perlengkapan lain yang ada dikapal.

Lampiran 2



Gambar : Pelaksanaan patroli maritime yang dilakukan oleh personil KPLP di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Lampiran 3



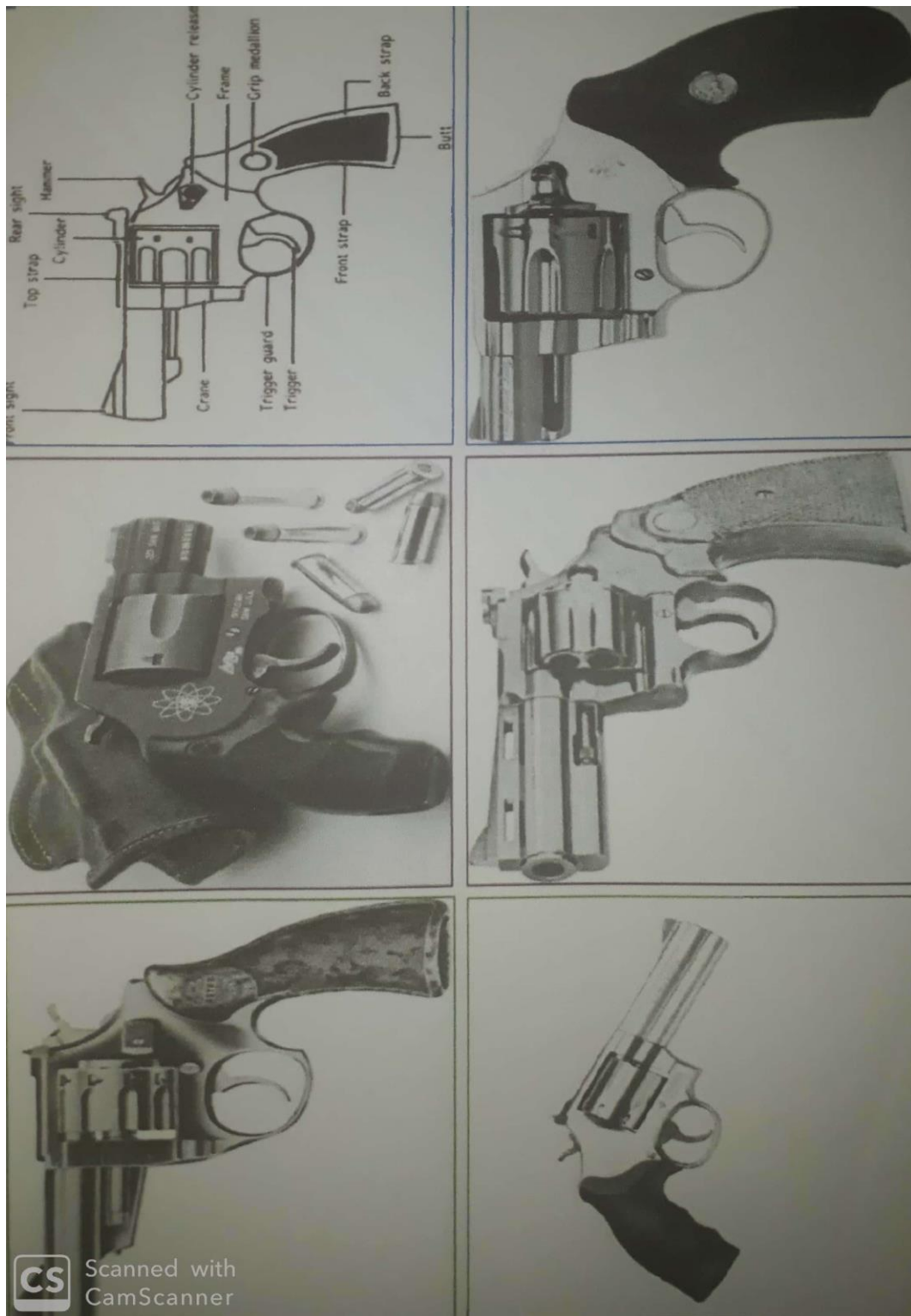
Gambar : Alur Laporan Kejadian Tindak Pidana Pelayaran



Gambar : Kapal Patroli KPLP



Gambar : Peluru dari senjata api KPLP



Gambar : Senjata api *Resolving pistol* KPLP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : MUKHAMMAD
MIFTAKHUN NI'AM
2. Nomor Induk Taruna : 52155864 K
3. Agama : Islam
4. Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 23 Juni 1996
5. Alamat : Ds. Karanggondang RT01/RW03, Kec.
Mlonggo, Kab. Jepara
6. Nama dan Pekerjaan Orang tua
 - a. Bapak : H. MULYADI
Pekerjaan : WIRASWASTA
 - b. Ibu : Hj. ISMAWATI
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
7. Riwayat Pendidikan
 - a. Lulus TK : Tahun 2002 (RA Darul Huda)
 - b. Lulus Sekolah Dasar : Tahun 2008 (SDN 01 Karanggondang)
 - c. Lulus SMP : Tahun 2011 (SMPN 01 Jepara)
 - d. Lulus SMA : Tahun 2014 (SMAN 01 Jepara)
 - e. Sekarang : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
dari
Tahun 2015
8. Pengalaman Praktek Darat : PT. Varia Usaha Bahari Tuban

